

Navigasi Tegangan Pasar: Pengalaman Penyuluh Pertanian dalam Mendampingi Petani di Kawasan Perbatasan Indonesia–Malaysia (Studi Fenomenologi di BPP Sebatik Barat)

**Hutama Muhammad Anhar^{1*}, Nurul Jamilah Cahyani², Ahmad Hadafi³,
Kharisma Ilyasa Anhar⁴**

¹Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

²Magister Agroteknologi, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Jawa Timur

³Agroteknologi, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Jawa Timur

⁴Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

*Email Korespondensi: 25061020010@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Pulau Sebatik merupakan satu-satunya pulau berpenghuni di Indonesia yang berbagi daratan langsung dengan Malaysia, menciptakan konteks penyuluhan pertanian yang unik sekaligus penuh tegangan: petani berorientasi pada pasar Tawau, sementara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengemban mandat pembangunan pertanian nasional. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan esensi pengalaman hidup PPL dalam menavigasi tegangan antara program penyuluhan nasional dan realitas sistem pangan lintas batas di kawasan perbatasan Sebatik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif mengacu pada prosedur tujuh langkah Moustakas (1994). Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan satu Koordinator BPP sebagai key informant, sepuluh PPL sebagai informan utama, dan dua hingga tiga ketua Gapoktan sebagai informan pendukung triangulasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan epoche, horizontalization, reduksi, pengelompokan tema, deskripsi tekstural, deskripsi struktural, hingga sintesis esensi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan member checking. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tema fenomenologis: (1) gravitasi pasar dan tegangan vertikal sebagai kondisi eksistensial; (2) negosiasi parsial sebagai etika kerja lapangan; (3) relasi dan kekeluargaan sebagai tumpuan makna; dan (4) hambatan berlapis, transformasi, dan posisi penjaga kemungkinan. Penelitian ini menghasilkan konstruk teoritis baru "keeper of possibilities" sebagai koreksi terhadap framing PPL sebagai "agent of change" yang tidak proporsional untuk konteks kawasan perbatasan 3T, sekaligus menyampaikan implikasi kebijakan konkret untuk reformulasi sistem evaluasi kinerja dan pengembangan SDM penyuluhan di wilayah kepulauan perbatasan Indonesia.

Kata kunci: Penyuluh Pertanian, Fenomenologi, Kawasan Perbatasan, Ketahanan Pangan, Navigasi Pasar

Abstract

Sebatik Island is the only inhabited island in Indonesia that shares a land border directly with Malaysia, creating a unique and tension-laden agricultural extension context: farmers are oriented toward the Tawau market, while Agricultural Extension Workers (PPL) carry a national agricultural development mandate. This study aims to explore and describe the essence of PPL's lived experience in navigating the tension between national extension programs and the cross-border food system reality in the Sebatik border area. A qualitative approach with a descriptive phenomenological design was employed, following Moustakas's (1994) seven-step procedure. Participants were selected through purposive sampling, involving one BPP Coordinator as key informant, ten PPL as primary informants, and two to three Gapoktan chairpersons as triangulation informants. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, field observation, and document analysis, then analyzed through the stages of epoche, horizontalization, reduction, meaning clustering, textural description, structural description, and essence synthesis. Data credibility was ensured through source triangulation and member checking. Findings identified four phenomenological themes: (1) market gravity and vertical tension as an existential condition; (2) partial negotiation as field work ethics; (3) relationships and kinship as an anchor of meaning; and (4) layered obstacles, transformation, and the position of "keeper of possibilities." This study introduces a new theoretical construct, the "keeper of possibilities" as a corrective to the disproportionate framing of PPL as "agent of change" in remote border area contexts, while offering concrete policy implications for reformulating performance evaluation systems and human resource development for extension workers in Indonesia's border island regions.

Keywords: Agricultural Extension, Phenomenology, Border Area, Food Security, Market Navigation

PENDAHULUAN

Pulau Sebatik adalah anomali geopolitik yang jarang mendapat perhatian dalam kajian penyuluhan pertanian Indonesia. Pulau seluas 247,27 km² ini adalah satu-satunya pulau berpenghuni di Indonesia yang berbagi daratan langsung dengan Malaysia — terbagi antara Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, dan Sebatik Timur di sisi Indonesia, serta daerah Tawau di sisi Malaysia (Sabah). BPP Sebatik Barat membawahi dua kecamatan: Kecamatan Sebatik Barat (luas 93,27 km², 4 desa, 8.193 jiwa) dan Kecamatan Sebatik Tengah (luas 47,71 km², 4 desa, 8.293 jiwa). Jarak Kecamatan Sebatik Tengah dari pusat kabupaten mencapai ± 50 km dengan waktu tempuh ± 90 menit menggunakan transportasi darat dan laut — jauh lebih dekat ke Tawau daripada ke Nunukan (BPP Sebatik Barat, 2023).

Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai pusat budidaya pertanian, khususnya perkebunan dan hortikultura. Komoditas utamanya — pisang, kakao, sawit, dan cengkeh — dihasilkan oleh penduduk yang sebagian besar merupakan pendatang dari Sulawesi, Jawa, dan NTT, dengan latar belakang pertanian yang beragam. Pisang menjadi komoditas hortikultura terbesar: luas tanam 353 ha dengan produksi 7.060 ton per tahun. Angka ini bukan kecil — namun seluruhnya mengalir ke Tawau, Malaysia, tanpa satu pun fasilitas pengolahan pascapanen yang berfungsi di tingkat petani. Program BPP 2023 mencatat dengan eksplisit: '0% petani belum mengetahui pengolahan dan pemasaran buah pisang' — padahal alat pengolahan pisang sudah diadakan oleh pemerintah dan secara fisik berada di wilayah tersebut, namun 'belum difungsikan' karena tidak ada operator yang terlatih (BPP Sebatik Barat, 2023).

73 dari 75 kelompok tani (97,3%) berada di kelas 'Pemula' — tidak ada satu pun yang mencapai kelas Madya atau Utama setelah bertahun-tahun pembinaan. Tidak ada satu pun Taruna Tani di delapan desa — mengindikasikan absennya regenerasi petani muda dan stagnansi kelembagaan yang bersifat struktural. Anwarudin, et.al. (2020) menemukan bahwa regenerasi petani melalui multistrategi — termasuk peran aktif PPL dalam mengadvokasi keterlibatan pemuda — adalah kunci keberlanjutan sistem pertanian nasional; kondisi absennya Taruna Tani di Sebatik menunjukkan bahwa strategi ini belum berhasil menjangkau wilayah perbatasan kepulauan. 10 PPL (9 PNS + 1 POPT/PHP, 0 THL-TBPP) untuk dua kecamatan dengan 16.486 jiwa dan ratusan petani aktif — rasio SDM penyuluhan yang jauh di bawah standar nasional. Desa Bukit Harapan, Sebatik Tengah, belum memiliki jaringan selular yang mumpuni (per 2026) — sementara kebijakan

penyuluhan nasional mendorong digitalisasi melalui SIMLUHTAN dan e-RDKK. 80% petani menggunakan benih yang sama berulang-ulang; 98% penggunaan benih tidak sesuai anjuran PPL (45 kg/ha vs anjuran 25 kg/ha dengan SRI) — menunjukkan gap antara transfer pengetahuan formal dan praktik aktual petani.

Kondisi ini menghadirkan paradoks yang serius. Di satu sisi, BPP Sebatik Barat memiliki program penyuluhan yang tersusun secara partisipatif, SDM penyuluh berstatus PNS yang profesional, dan komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi. Di sisi lain, 8 Gapoktan yang aktif namun tidak ada yang berkembang secara kelembagaan — sebuah kondisi yang menurut Wardani & Anwarudin (2018) mencerminkan lemahnya peran PPL dalam regenerasi kelembagaan, meskipun dalam konteks Sebatik kondisi ini lebih disebabkan oleh hambatan struktural daripada ketidakmauan PPL, kearifan lokal yang kaya namun tidak terinstitusionalisasi, dan pasar domestik yang tidak mampu bersaing dengan jaringan dagang Malaysia yang sudah mengakar puluhan tahun. Paradoks ini bukan kegagalan individual PPL atau petani — ia adalah cerminan dari sebuah sistem penyuluhan yang dirancang untuk konteks domestik, namun dioperasikan dalam realitas yang sebagian besar gravitasinya mengarah ke luar negeri.

Yang luput dari perhatian adalah pertanyaan yang paling fundamental: bagaimana PPL sendiri mengalami dan memaknai kenyataan ini? Bagaimana mereka — sebagai manusia dengan identitas profesional, tanggung jawab institusional, dan relasi personal dengan komunitas petani perbatasan — menavigasi tegangan yang tidak pernah masuk dalam kurikulum pelatihan mereka? Programa BPP mencatat masalah dan tujuan, SIMLUHTAN merekam frekuensi kunjungan, e-RDKK mendokumentasikan realisasi pupuk — tetapi tidak ada satu pun sistem yang merekam pengalaman batin dan strategi adaptif PPL yang setiap hari berdiri di titik gesekan antara dua sistem pertanian yang berbeda negara.

Urgensi penelitian ini beroperasi pada dua skala yang saling memperkuat. Pada skala lokal, agenda RPJMN 2025–2029 menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas nasional — dan kawasan perbatasan seperti Sebatik adalah titik paling rentan sekaligus paling strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Jika kemandirian pangan di wilayah perbatasan tidak bisa diwujudkan justru karena sistem penyuluhan yang beroperasi di sana tidak mampu merespons realitas lintas batas, maka seluruh investasi program penyuluhan nasional di wilayah tersebut berisiko menjadi tidak relevan. Keberhasilan program penyuluhan pertanian di perbatasan tidak bisa diukur hanya dari

jumlah pertemuan kelompok tani atau dokumen laporan yang terisi — ia harus diukur dari seberapa jauh petani mampu mengambil posisi tawar yang lebih kuat dalam sistem pangan yang mencakup dua negara.

Stagnansi kelembagaan yang terdokumentasikan — 73 dari 75 kelompok tani tidak bergerak dari kelas Pemula setelah bertahun-tahun penyuluhan — adalah sinyal bahwa sesuatu yang fundamental tidak berjalan sebagaimana mestinya. Memahami akar dari stagnansi ini bukan sekadar kepentingan akademis; ia adalah kebutuhan kebijakan yang mendesak bagi Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta pemerintah daerah dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.

Kawasan perbatasan pertanian lintas negara adalah fenomena yang semakin penting dalam konteks integrasi *ASEAN Economic Community*. Studi tentang pemberdayaan petani perbatasan (Christyanto, et al. 2021) menegaskan bahwa ketahanan pangan komunitas perbatasan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor lokal — termasuk agen penyuluhan — untuk menavigasi tekanan sistem pangan lintas batas. Wardani & Anwarudin (2018) menambahkan bahwa penguatan kelompok tani oleh PPL adalah kunci keberlanjutan sistem pertanian di wilayah marginal. Namun dalam literatur, perspektif 'penyuluh sebagai agen negara yang setiap hari bekerja di medan yang dipengaruhi sistem pangan negara tetangga' adalah gap yang nyata dan belum pernah dieksplorasi secara mendalam. Penelitian di Sebatik berpotensi menjadi referensi bagi kawasan perbatasan pertanian serupa di ASEAN: Kalimantan–Sarawak, Papua–PNG, atau Timor–Timor Leste.

Pada skala kelembagaan, kondisi SDM penyuluhan di BPP Sebatik Barat — 10 PPL untuk dua kecamatan dengan nol THL-TBPP, nol Taruna Tani, dan satu desa tanpa jaringan selular — menciptakan tekanan kerja yang tidak terdistribusi secara memadai. Setiap PPL menanggung beban ganda: memenuhi target administratif sistem pelaporan nasional (SIMLUHTAN, e-RDKK, programa) sekaligus merespons realitas lapangan yang tidak tercermin dalam instrumen pelaporan tersebut. Bila kelelahan eksistensial yang lahir dari tegangan ini tidak dikenali dan ditangani, ia berpotensi menciptakan krisis SDM penyuluhan di wilayah perbatasan yang justru paling membutuhkan penyuluh yang berpengalaman dan berdedikasi.

Kajian tentang penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama dalam hal pengukuran efektivitas dan adopsi inovasi. Prestiana, et al. (2023) menemukan bahwa PPL sebagai *agent of change* memiliki

pengaruh substansial terhadap adopsi inovasi padi — namun studi ini dilakukan di wilayah sentra pertanian Jawa dengan orientasi pasar domestik yang stabil. Setiawan & Susanto (2024) menegaskan peran mediasi PPL dalam proses difusi inovasi, sementara Nurida, et al. (2024) membuktikan korelasi positif antara intensitas pendampingan PPL dengan tingkat adopsi teknologi pertanian. Sugihono, et al. (2024) melaporkan 95% PPL telah menggunakan *smartphone* dan *WhatsApp* sebagai media utama penyuluhan — sebuah pencapaian digitalisasi yang seolah mengabaikan fakta bahwa di Desa Bukit Harapan, Sebatik Tengah, jaringan selular belum tersedia sama sekali.

Kajian tentang penyuluhan di wilayah terpencil dan perbatasan juga mulai berkembang. Christyanto, et al. (2021) menegaskan pentingnya pembangunan pertanian perbatasan yang mempertimbangkan dinamika lintas negara, dan merekomendasikan pendekatan pemberdayaan yang kontekstual. Penelitian di kawasan perbatasan Kalimantan ini memberi dasar argumentatif yang penting — namun tetap beroperasi pada level analisis kebijakan makro, tidak menyentuh pengalaman mikro agen penyuluhan yang beroperasi di garis depan. Nuzuliyah & Irawan (2022) menekankan bahwa evaluasi berbasis perubahan perilaku petani lebih akurat dibanding evaluasi berbasis frekuensi kegiatan semata — temuan yang relevan dengan konteks Sebatik di mana kearifan lokal komunitas perbatasan adalah aset yang sering kali diabaikan oleh kebijakan pertanian nasional, namun siapa yang bertugas menjembatannya ke dalam sistem formal, dan bagaimana pengalaman jembatan itu dijalani, tidak pernah menjadi objek kajian.

Dalam dimensi manajemen SDM penyuluhan, Sumardjo, et al. (2020) dan Noe (2017) meletakkan fondasi strategis tentang rekrutmen, pengembangan kapasitas, dan manajemen kinerja PPL sebagai fungsi-fungsi yang saling terkait dan menentukan efektivitas penyuluhan. Namun kerangka ini dibangun dari konteks organisasi yang beroperasi dalam sistem ekonomi tunggal — bukan organisasi yang agen lapangannya setiap hari berhadapan dengan tarikan pasar negara tetangga sebagai kekuatan eksternal yang melampaui kapasitas respon institusional. Anwarudin, et al (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan pertanian bagi petani muda sangat ditentukan oleh kemampuan PPL merespons dinamika lingkungan lokal — sebuah argumen yang relevan dengan konteks Sebatik, di mana lingkungan tersebut mencakup gravitasi sistem ekonomi negara tetangga yang tidak dapat diabaikan.

Dari pemetaan literatur di atas, teridentifikasi tiga kekosongan yang saling terkait dan secara bersama-sama memotivasi penelitian ini. Gap Pertama — Absennya Dimensi

Eksperiensial Literatur penyuluhan pertanian Indonesia dan internasional didominasi oleh pendekatan positivistik yang mengukur efektivitas, adopsi inovasi, dan kinerja PPL melalui variabel-variabel terukur. Pengalaman batin, konstruksi makna, dilema etis, dan strategi adaptif yang dikembangkan PPL sebagai individu yang hidup dan bekerja dalam tegangan — tidak pernah menjadi objek kajian. Dimensi eksperiensial ini hanya dapat dijangkau melalui pendekatan fenomenologis, yang masih sangat langka dalam literatur penyuluhan pertanian Indonesia (2021–2025).

Gap Kedua — Kekosongan Studi PPL di Kawasan Perbatasan Lintas Negara Tidak ditemukan satu pun studi fenomenologi tentang pengalaman PPL yang beroperasi di kawasan yang sistem ekonomi pertaniannya terintegrasi dengan negara tetangga. Konstruksi 'tegangan pasar lintas batas sebagai variabel konteks yang membentuk pengalaman agen penyuluhan' adalah *white spot* dalam seluruh literatur yang dikaji. Ini bukan sekadar gap metodologis — ini adalah kekosongan substantif tentang realitas yang dialami ribuan PPL di kawasan perbatasan Indonesia setiap harinya.

Gap Ketiga — Invisibilitas Strategi Senyap dan Pengikisan Makna Sistem pelaporan formal penyuluhan nasional (SIMLUHTAN, e-RDKK, programa) dirancang untuk merekam aktivitas yang terencana dan terukur. Ia tidak pernah dirancang untuk merekam inovasi adaptif yang dikembangkan PPL di luar protokol formal, maupun erosi makna eksistensial yang terjadi ketika PPL senior bertahun-tahun menyaksikan stagnansi yang tidak terpecahkan. Keduanya — strategi senyap dan pengikisan makna — adalah realitas yang hanya bisa diakses melalui wawancara mendalam yang bersifat fenomenologis, dan keduanya belum pernah dikaji dalam konteks penyuluhan pertanian perbatasan.

Ketiga gap ini tidak berdiri sendiri-sendiri; ia membentuk satu lautan kekosongan yang sama: ketidakhadiran suara PPL itu sendiri dalam diskursus akademis dan kebijakan tentang penyuluhan pertanian di kawasan perbatasan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut — bukan dengan mengklaim telah menemukan kebenaran tunggal, melainkan dengan membuka ruang bagi makna dan pengalaman yang selama ini tidak terdengar untuk akhirnya didengar, dicatat, dan dipahami.

Bertolak dari fenomena, data lapangan, urgensi, dan gap literatur yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan oleh empat tujuan yang saling berkaitan. Pertama, mengeksplorasi dan mendeskripsikan esensi pengalaman hidup PPL dalam menavigasi tegangan antara program penyuluhan nasional dan realitas sistem pangan lintas batas di

kawasan perbatasan Sebatik. Kedua, memahami makna yang dikonstruksi PPL terhadap peran, identitas, dan dilema etisnya sebagai agen pembangunan pertanian Indonesia di wilayah yang sebagian besar gravitasi ekonominya mengarah ke Malaysia. Ketiga, mengidentifikasi strategi adaptif — baik yang bersifat formal maupun senyap — yang dikembangkan PPL dalam menghadapi tegangan pasar yang bersifat struktural dan kronis. Keempat, membangun konstruk teoritis baru 'navigasi tegangan pasar' (*market tension navigation*) sebagai kontribusi pada teori penyuluhan pertanian dan fenomenologi pedesaan perbatasan.

Ruang lingkup kajian ini dibatasi secara tegas pada pengalaman PPL sebagai subjek utama — bukan pada petani, kebijakan, atau analisis sistem pertanian secara komparatif lintas negara. Secara spasial, penelitian berfokus pada wilayah kerja BPP Sebatik Barat yang mencakup delapan desa di dua kecamatan. Secara temporal, kajian ini merujuk pada kondisi kekinian yang terdokumentasikan dalam Program BPP 2023 dan pengalaman lapangan yang berlangsung hingga saat pengumpulan data dilakukan. Pilihan pendekatan fenomenologi deskriptif (Moustakas, 1994) secara epistemologis menempatkan pengalaman subjektif informan sebagai sumber pengetahuan yang sah dan berharga — sebuah posisi yang berbeda dari paradigma positivistik yang selama ini mendominasi penelitian penyuluhan pertanian.

Kontribusi Teoritis Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis dalam tiga hal: (1) menghadirkan fenomenologi sebagai pendekatan metodologis yang *legitimate* dalam kajian penyuluhan pertanian Indonesia, membuka agenda penelitian baru yang selama ini tertutup; (2) memperkenalkan konstruk 'navigasi tegangan pasar' sebagai kategori konseptual baru yang memperluas teori peran PPL melampaui *framing* konvensional fasilitator–motivator–komunikator; dan (3) memperkaya teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 2010) dengan dimensi *cross-border economic tension* sebagai variabel konteks yang mengubah karakter diskresi informal agen lapangan di kawasan perbatasan.

Kontribusi Praktis Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan: (1) menyediakan basis empiris yang kaya dan berbasis pengalaman nyata untuk reformulasi kebijakan SDM penyuluhan di kawasan perbatasan 3T; (2) menghasilkan rekomendasi pengembangan kapasitas PPL yang responsif terhadap realitas pasar lintas batas — bukan hanya berbasis protokol teknis agronomis; (3) memberikan suara kepada PPL sebagai kelompok profesional yang selama ini absen dalam diskursus kebijakan pangan perbatasan,

sekaligus menunjukkan kepada pengambil kebijakan bahwa stagnansi yang tampak di permukaan — 73 dari 75 kelompok tani di kelas Pemula — memiliki akar yang jauh lebih dalam dari sekadar masalah teknis atau administratif.

Dengan demikian, artikel ini diposisikan sebagai upaya memberi makna terhadap sesuatu yang selama ini ada tetapi tidak terlihat: pengalaman seorang PPL yang setiap pagi menyeberangi selat membawa program, sementara di seberang jalan truk berplat Malaysia sudah lebih dulu tiba. Ia bukan hanya kisah tentang penyuluhan yang belum efektif. Ia adalah kisah tentang apa artinya menjadi agen pembangunan negara di tanah yang dinamika ekonominya melampaui batas negara — dan tentang bagaimana, di tengah semua tegangan itu, manusia-manusia yang disebut PPL tetap berdiri, beradaptasi, dan mencari makna dari pekerjaan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif yang berakar pada tradisi filsafat Edmund Husserl dan dikembangkan secara metodologis oleh Clark Moustakas (1994). Pilihan ini bukan sekadar preferensi metodologis, melainkan sebuah keputusan epistemologis yang lahir dari karakteristik pertanyaan penelitian itu sendiri. Ketika penelitian ini bertanya 'bagaimana PPL mengalami dan memaknai tegangan antara mandat penyuluhan nasional dan realitas sistem pangan lintas batas di Sebatik?', ia tidak sedang mencari frekuensi, korelasi, atau kausalitas — ia sedang mencari esensi: sesuatu yang hanya dapat diungkap melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman hidup subjek yang terdampak langsung.

Fenomenologi deskriptif dipilih atas tiga landasan yang saling menguatkan. Pertama, secara ontologis, realitas yang ingin dipahami dalam penelitian ini bersifat intersubjektif dan kontekstual — pengalaman seorang PPL di Sebatik Tengah dalam menavigasi tegangan pasar hanya dapat dipahami dalam konteks hidupnya, bukan melalui abstraksi numerik. Kedua, secara epistemologis, pengetahuan tentang fenomena ini hanya dapat diperoleh melalui kesaksian langsung dari subjek yang mengalaminya, dan pendekatan fenomenologis menempatkan kesaksian tersebut sebagai sumber pengetahuan yang paling sah. Ketiga, secara metodologis, prosedur analitik Moustakas (1994) — yang dimulai dari epoche, berlanjut ke reduksi fenomenologis, variasi imajinasi, hingga sintesis esensi — menyediakan kerangka kerja yang sistematis namun tidak mengorbankan kedalaman makna yang menjadi roh penelitian kualitatif.

Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi desain fenomenologi deskriptif-transendental Moustakas (1994) yang menekankan deskripsi murni pengalaman tanpa interpretasi teoritis yang prematur. Berbeda dari fenomenologi hermeneutis (Heidegger; van Manen) yang menekankan penafsiran makna tersembunyi, fenomenologi deskriptif bertujuan mendeskripsikan 'apa yang dialami' (*textural description*) dan 'bagaimana pengalaman itu terjadi' (*structural description*) sebelum mensintesisnya menjadi pernyataan esensi (*essence statement*) yang berlaku secara universal bagi semua partisipan yang mengalami fenomena yang sama. Pendekatan ini memberi peneliti — dan pembaca — gambaran yang paling jujur dan paling kaya tentang pengalaman PPL perbatasan, tanpa mereduksinya ke dalam kategori yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sebatik Barat, yang secara administratif mencakup dua kecamatan: Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua kecamatan ini berada di Pulau Sebatik — pulau yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Kecamatan Sebatik Barat mencakup empat desa (Setabu, Binalawan, Liang Bunyu, Bambang) dengan luas 93,27 km² dan populasi 8.193 jiwa, sementara Kecamatan Sebatik Tengah mencakup empat desa (Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, Bukit Harapan) dengan luas 47,71 km² dan populasi 8.293 jiwa (BPP Sebatik Barat, 2023).

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan empat pertimbangan substantif. Pertama, keunikan geopolitik: Pulau Sebatik adalah satu-satunya lokasi di Indonesia di mana seorang PPL menjalankan tugasnya di pulau yang berbagi daratan langsung dengan Malaysia, menjadikannya lokus yang paling relevan untuk mengeksplorasi fenomena navigasi tegangan pasar lintas batas. Kedua, ketersediaan data lapangan: Program BPP Sebatik Barat 2023 menyediakan dokumentasi kondisi pertanian yang sangat kaya dan dapat diverifikasi, menguatkan kontekstualisasi temuan. Ketiga, aksesibilitas institusional yang memungkinkan akses ke informan secara etis dan terbuka. Keempat, kebaruan akademis: belum ada studi fenomenologis yang pernah dilakukan di lokasi ini, menjadikan penelitian ini benar-benar virgin ground dalam literatur penyuluhan pertanian Indonesia.

Penduduk wilayah ini bersifat heterogen: Kecamatan Sebatik Barat didominasi suku Tidung (penduduk asli) dengan campuran pendatang dari Sulawesi dan Jawa. Kecamatan Sebatik Tengah hampir seluruhnya merupakan pendatang dari Sulawesi

(Bugis), Jawa, dan NTT (Timor). Interaksi sosial-ekonomi lintas batas bersifat sehari-hari dan telah berlangsung puluhan tahun, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai 'habitus perbatasan' (*border habitus*), yakni disposisi sosial yang terbentuk dari hidup di ruang pertemuan dua sistem sosial-ekonomi berbeda negara. Konteks ini adalah panggung tempat pengalaman PPL yang menjadi fokus penelitian ini berlangsung, dan pemahaman mendalam atas konteks ini adalah prasyarat bagi tafsir fenomenologis yang valid.

Berbeda dari penelitian kuantitatif yang mengutamakan keterwakilan statistik, pemilihan partisipan dalam fenomenologi didasarkan pada satu prinsip tunggal: mereka harus memiliki pengalaman hidup langsung (*lived experience*) terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Strategi yang digunakan adalah *purposive sampling* — pemilihan yang disengaja dan terencana berdasarkan kriteria yang secara langsung relevan dengan tujuan penelitian. Untuk informan pendukung dari kelompok petani atau Gapoktan, strategi ini dilengkapi dengan *snowball sampling* berdasarkan rekomendasi PPL atau Kepala BPP, karena identifikasi petani yang pernah terlibat langsung dalam dinamika pasar Malaysia memerlukan panduan dari orang yang mengenal komunitas secara mendalam.

Tabel 1. Kategori Partisipan

Kategori Partisipan	Kriteria Inklusi	Jumlah	Strategi	Justifikasi Fenomenologis
Kepala BPP Sebatik Barat (<i>Key Informant</i>)	Menjabat aktif; pengalaman min. 2 tahun; memiliki pandangan lintas dua kecamatan tentang dinamika penyuluhan perbatasan	1 orang	<i>Purposive</i>	Perspektif manajerial yang merekam tegangan dari posisi kepemimpinan; penting sebagai triangulasi konteks kelembagaan
PPL Sebatik Tengah (Informan Utama)	Kec. Bertugas aktif min. 2 tahun di Sebatik Tengah; pernah langsung mendampingi petani yang menjual ke Tawau; bersedia terbuka tentang pengalaman dan dilema yang dihadapi	5–6 orang	<i>Purposive</i> (total sampling)	Episentrum tegangan pasar; PPL di kecamatan ini menghadapi gravitasi Malaysia paling kuat dan langsung — sumber pengalaman

Kategori Partisipan	Kriteria Inklusi	Jumlah	Strategi	Justifikasi Fenomenologis
				fenomenologis paling relevan
PPL Kec. Sebatik Barat (Informan Utama)	Bertugas aktif min. 2 tahun di Sebatik Barat; pengalaman mendampingi pisang, kakao, atau padi; bersedia berbagi pengalaman adaptasi	4–5 orang	<i>Purposive</i> (total sampling)	Perspektif komparatif memperkaya esensi fenomena; dinamika tegangan pasar di Sebatik Barat mungkin berbeda gradasi dan bentuknya
Petani / Ketua Gapoktan (Informan Pendukung)	Aktif dalam Gapoktan; pernah terlibat dalam keputusan pemasaran ke Tawau; memiliki relasi kerja jangka panjang dengan PPL	2–3 orang	Snowball	Triangulasi: perspektif penerima layanan membantu memverifikasi dan memperdalam temuan tentang strategi adaptif yang dikembangkan PPL

Dalam tradisi fenomenologis, jumlah partisipan tidak ditentukan secara apriori oleh formula statistik, melainkan oleh prinsip saturasi tematik (*thematic saturation*): wawancara dihentikan ketika partisipan berikutnya tidak lagi menghasilkan tema atau nuansa makna yang baru (Guest, et al, 2006). Mengingat total PPL di BPP Sebatik Barat berjumlah 10 orang, strategi total sampling purposif diterapkan untuk seluruh PPL yang memenuhi kriteria — memaksimalkan kedalaman dan kekayaan data dari populasi yang terbatas. Jumlah ini berada dalam rentang yang lazim dan direkomendasikan untuk studi fenomenologis (5–25 partisipan; Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi. Setiap teknik dirancang untuk mengakses lapisan yang berbeda dari fenomena yang diteliti: wawancara mendalam untuk mengakses pengalaman dan makna yang dikonstruksi PPL; observasi lapangan untuk mengakses konteks dan dinamika yang tidak selalu terverbalisasi; dan studi dokumentasi untuk mengakses rekam jejak institusional

yang menjadi latar bagi pengalaman tersebut. Kombinasi ketiga teknik ini juga berfungsi sebagai basis triangulasi yang memperkuat keabsahan temuan.

Wawancara mendalam adalah teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Berbeda dari wawancara terstruktur konvensional, wawancara fenomenologis mengikuti protokol khusus yang dikembangkan Moustakas (1994): peneliti memulai dengan pertanyaan luas dan terbuka, membiarkan informan memimpin arah narasi, dan secara aktif menghindari pengarahannya yang dapat mengkontaminasi pengalaman yang sedang diungkapkan. Peneliti berfungsi sebagai 'pendengar fenomenologis' — hadir sepenuhnya, terbuka, dan bebas dari asumsi (*epoche*) selama proses wawancara.

Pertanyaan pembuka yang akan digunakan: 'Bapak/Ibu sudah cukup lama bertugas sebagai PPL di sini. Saya ingin memahami bagaimana rasanya — bukan secara teknis, tapi secara pengalaman nyata — menjalankan tugas penyuluhan di wilayah perbatasan ini. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan momen atau situasi yang paling membekas dalam ingatan, ketika ada sesuatu yang tidak mudah dihadapi dalam pekerjaan ini, terutama yang berkaitan dengan bagaimana petani di sini berhubungan dengan pasar di seberang?' Pertanyaan ini dirancang untuk memancing narasi yang kaya tanpa membatasi informan pada konstruk tertentu.

Tabel 2. Aspek Prosedural Wawancara

Aspek Prosedural	Detail Pelaksanaan
Durasi	90–120 menit untuk PPL (informan utama); 60–90 menit untuk petani/Gapoktan; dapat dilanjutkan dengan sesi kedua untuk member checking
Media	Tatap muka langsung diprioritaskan; video call (WhatsApp/Zoom) sebagai alternatif untuk PPL yang wilayah binaannya sulit dijangkau pada saat kunjungan penelitian
Rekaman	Rekaman audio menggunakan dua perangkat (smartphone + recorder cadangan) dengan izin tertulis informan; peneliti juga membuat catatan lapangan reflektif secara paralel
Bahasa	Bahasa Indonesia formal dengan ruang bagi dialek/ungkapan lokal yang akan diterjemahkan dan didokumentasikan; istilah pertanian lokal Sebatik diverifikasi dengan informan
Sesi	Minimal dua sesi per informan utama: sesi pertama untuk eksplorasi pengalaman; sesi kedua setelah analisis awal untuk member checking dan pendalaman tema

Aspek Prosedural	Detail Pelaksanaan
Probe	Pertanyaan probe: 'Bisa ceritakan lebih lanjut?', 'Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat itu?', 'Apa yang Bapak/Ibu lakukan kemudian?', 'Apakah ada orang lain yang mengalami hal serupa?'

Observasi lapangan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data pendukung yang berfungsi untuk menangkap dimensi-dimensi pengalaman yang tidak selalu dapat diverbalisasi dalam wawancara. Peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk mengamati konteks fisik dan sosial tempat pengalaman PPL berlangsung, bukan sebagai pengamat pasif melainkan sebagai pengamat partisipatif yang membangun relasi dan pemahaman kontekstual. Fokus observasi ditetapkan pada momen-momen di mana tegangan pasar tampak secara kasat mata: pertemuan kelompok tani, kunjungan PPL ke lahan, interaksi di pos perdagangan, dan dinamika di kantor BPP ketika laporan harus diselesaikan.

Catatan lapangan (*field notes*) ditulis segera setelah setiap sesi observasi, membedakan antara *observational notes* (deskripsi faktual apa yang dilihat dan didengar), *methodological notes* (refleksi tentang proses penelitian), dan *theoretical notes* (koneksi awal antara observasi dengan konsep yang sedang dikembangkan). Catatan ini akan menjadi data analitik yang setara dengan transkrip wawancara.

Studi dokumentasi mengakses data dari sumber tertulis yang memberikan konteks institusional dan historis bagi pengalaman PPL. Dokumen yang dianalisis meliputi: (1) Programa Penyuluhan Pertanian BPP Sebatik Barat Tahun 2023 — dokumen primer yang menjadi basis kontekstualisasi empiris seluruh penelitian ini; (2) laporan kinerja PPL dan data realisasi programa; (3) data SIMLUHTAN dan e-RDKK sebagai rekam jejak aktivitas formal penyuluhan; (4) Monografi Desa se-Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2022; serta (5) dokumen kebijakan relevan: UU No. 16/2006 dan Permentan No. 47/2016 tentang Programa Penyuluhan. Analisis dokumen mengikuti pendekatan content analysis tematik — dokumen dibaca sebagai artefak institusional yang mencerminkan cara organisasi mengkonstruksi realitasnya. Kesenjangan antara yang tercatat dalam programa dengan yang diungkapkan informan adalah data analitik yang sangat berharga, karena ia mengungkap ruang di mana pengalaman PPL yang sesungguhnya beroperasi.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur analisis fenomenologis deskriptif tujuh langkah Moustakas (1994), yang dipadukan dengan prinsip-prinsip analisis

tematik reflektif Braun & Clarke (2022) untuk memperkuat transparansi dan rigor analitik. Prosedur Moustakas memastikan bahwa esensi fenomenologis tidak tereduksi menjadi kategorisasi yang terlalu sederhana, sementara analisis tematik Braun & Clarke menyediakan struktur yang lebih transparan dan dapat diaudit.

Keabsahan penelitian kualitatif tidak dinilai melalui kriteria validitas dan reliabilitas statistik, melainkan melalui empat kriteria *trustworthiness* yang dikembangkan Lincoln & Guba (1985): kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keempat kriteria ini tidak bersifat tambahan opsional — ia adalah standar minimum yang harus dipenuhi agar klaim penelitian fenomenologis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 3. Kriteria Keabsahan Penelitian

Kriteria	Makna dalam Konteks Penelitian Ini	Teknik yang Diterapkan	Implementasi Konkret
Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	Sejauh mana temuan mencerminkan pengalaman informan yang sesungguhnya, bukan interpretasi berlebihan peneliti atau bias yang tidak dikelola	Triangulasi sumber; <i>member checking</i> ; <i>prolonged engagement</i> ; <i>peer debriefing</i>	<i>Cross-check</i> data PPL vs Kepala BPP vs observasi vs dokumentasi; hasil analisis dikembalikan ke informan untuk dikonfirmasi; peneliti hadir cukup lama di lapangan; diskusi rutin dengan peneliti di luar tim
Transferabilitas (<i>Transferability</i>)	Sejauh mana temuan dapat dipindahkan ke konteks lain yang memiliki karakteristik serupa — bukan generalisasi statistik, tetapi relevansi fungsional	<i>Thick description</i> — deskripsi konteks yang sangat kaya dan terperinci	Deskripsi mendalam tentang geografi Sebatik, profil sosial-budaya penduduk, dinamika pasar perbatasan, dan profil PPL — memungkinkan pembaca dari konteks perbatasan lain menilai relevansi temuan
Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	Sejauh mana proses penelitian konsisten dan dapat diikuti jejaknya oleh peneliti lain dalam kondisi serupa	Audit trail yang komprehensif dan terdokumentasi	Dokumentasi lengkap: rekaman audio, transkrip verbatim, catatan lapangan, <i>reflective journal</i> , kode analitik di ATLAS.ti, dan catatan setiap keputusan

Kriteria	Makna dalam Konteks Penelitian Ini	Teknik yang Diterapkan	Implementasi Konkret
			metodologis — semua tersimpan terstruktur
Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>)	Sejauh mana temuan mencerminkan perspektif dan pengalaman informan, bukan proyeksi bias dan nilai peneliti	<i>Reflexivity statement; peer debriefing; negative case analysis</i>	Pernyataan posisi peneliti yang jujur dan eksplisit; diskusi rutin dengan peneliti di luar tim untuk memeriksa bias tafsir; aktif mencari kasus yang bertentangan dengan tema yang sedang berkembang

Dalam penelitian fenomenologis, peneliti adalah instrumen utama pengumpulan dan analisis data. Ini berarti latar belakang, pengalaman, nilai, dan asumsi peneliti secara tak terelakkan hadir dalam proses penelitian — dan mengelolanya secara jujur adalah kewajiban metodologis, bukan pilihan. Peneliti dalam studi ini akan mendokumentasikan posisi mereka secara eksplisit melalui *reflexivity statement*: apakah mereka berasal dari dalam atau luar komunitas Sebatik, apakah mereka memiliki afiliasi institusional dengan BPP atau Dinas Pertanian, dan bagaimana *proximity* atau *distance* tersebut memengaruhi akses ke informan serta kemungkinan bias tafsir.

Reflective journal — catatan harian peneliti tentang proses penelitian, reaksi emosional, keputusan metodologis, dan perkembangan pemikiran analitik — akan ditulis mulai dari hari pertama penelitian lapangan hingga selesainya penulisan. Jurnal ini bukan bagian dari data yang dipublikasikan, tetapi ia adalah komponen penting dari audit trail dan konfirmabilitas penelitian.

Penelitian yang melibatkan manusia sebagai informan memikul tanggung jawab etis yang tidak dapat dikompromikan demi kepentingan akademis apapun. Seluruh prosedur etis dalam penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa partisipasi informan berlangsung dalam kondisi yang bermartabat, sukarela, dan terlindungi.

Keseluruhan desain metodologis yang diuraikan di atas mencerminkan satu keyakinan epistemologis yang mendasar: bahwa pengalaman PPL di kawasan perbatasan Sebatik adalah sumber pengetahuan yang valid, kaya, dan belum pernah diakses dengan sungguh-sungguh oleh dunia akademis. Fenomenologi deskriptif — dengan prosedur

analitiknya yang sistematis namun tetap menghormati kompleksitas makna, dengan standar keabsahannya yang ketat namun tidak positivistik, dan dengan komitmen etisnya yang menempatkan martabat informan di atas kepentingan publikasi — adalah pilihan metodologis yang paling konsisten dengan keyakinan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis fenomenologis terhadap tiga transkripsi wawancara mendalam — dengan Koordinator BPP Sebatik Barat (KP-01), seorang PPL yang mewakili perspektif lapangan (PPL-SB-01), dan tim PPL dalam sesi kelompok bersama petani (PPL-GRP) — menghasilkan tujuh tema bermakna yang kemudian dikonsolidasikan menjadi empat tema utama untuk kepentingan pembahasan artikel ini. Konsolidasi dilakukan berdasarkan kedekatan substansial antar-tema dan pertimbangan keterbacaan naratif, tanpa mengorbankan kompleksitas makna yang muncul dari data. Keempat tema utama itu adalah: (1) Gravitasi Pasar dan Tegangan Vertikal sebagai Kondisi Eksistensial; (2) Negosiasi Parsial sebagai Etika Kerja Lapangan; (3) Relasi dan Kekeluargaan sebagai Tumpuan Makna; serta (4) Hambatan Berlapis, Transformasi, dan Posisi Penjaga Kemungkinan.

Penting untuk dicatat sejak awal: temuan penelitian ini menolak narasi tunggal tentang PPL perbatasan sebagai pihak yang gagal, atau sebaliknya, sebagai pahlawan yang berhasil mengubah keadaan. Yang muncul dari data adalah sesuatu yang lebih jujur dan lebih manusiawi: gambaran individu-individu yang bekerja dalam kondisi struktural yang tidak mereka pilih, menemukan cara untuk tetap bermakna di tengah keterbatasan yang nyata, dan pada akhirnya menyaksikan perubahan yang mereka tidak bisa klaim sebagai milik mereka sendiri — namun tetap merasakannya sebagai konfirmasi atas dedikasi bertahun-tahun.

Gravitasi Pasar dan Tegangan Vertikal Sebagai Kondisi Eksistensial

Ketika Realitas Menolak Diperintah

Ada momen yang hampir pasti pernah dialami oleh setiap PPL yang bertugas di Sebatik Tengah: seorang PPL tiba di lahan petani dengan materi penyuluhan tentang diversifikasi komoditas atau nilai tambah lokal, sementara di ujung jalan, truk bermuatan pisang sudah menunggu untuk diberangkatkan ke Tawau. Bukan pada besok atau minggu depan — pada hari itu juga. Karena kalau tidak hari itu, kualitas pisang turun, harga jatuh, dan pendapatan petani berkurang. Inilah yang dimaksud PPL-SB-01 ketika ia berkata:

"Untuk 100 persen mengalihkan ke Indonesia, itu tidak bisa. Petani di Sebatik Tengah sudah punya hubungan kuat dengan Malaysia. Harga di sana lebih tinggi, jaraknya lebih dekat, dan jadwal *ferry* ke Nunukan hanya 2–3 kali seminggu. Hasil panen tidak bisa menunggu jadwal *ferry* karena kualitasnya bisa turun. Jadi kami bisa mendorong sebagian dialihkan ke Indonesia, tapi tidak bisa 100 persen."

Pernyataan itu bukan keluhan — ia adalah diagnosis yang jernih. PPL-SB-01 tidak sedang menyerah; ia sedang menggambarkan kondisi struktural yang bersifat objektif: asimetri infrastruktur yang membuat pasar Malaysia secara fungsional lebih aksesibel daripada pasar domestik. *Ferry* ke Nunukan terbatas, komoditas sensitif terhadap waktu, dan jaringan kepercayaan antara petani Sebatik dengan pedagang Malaysia sudah terbentuk puluhan tahun sebelum program penyuluhan nasional manapun masuk ke pulau ini.

KP-01 mengonfirmasi fenomena ini dari posisi kepemimpinan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa orientasi pasar Malaysia bukan anomali — ia adalah pola yang sudah mengakar dan harus dipahami sebagai fakta, bukan sebagai masalah yang bisa diselesaikan dengan penyuluhan yang lebih baik saja. Ketidakhadiran pabrik pengolah sawit di Bambangan selama bertahun-tahun, misalnya, bukan disebabkan oleh ketidaktahuan petani tentang nilai jual domestik, melainkan oleh ketiadaan infrastruktur yang memungkinkan pilihan itu terwujud. Dalam kerangka analisis fenomenologis, pengalaman ini membentuk apa yang disebut sebagai *horizon of possibility* — cakrawala kemungkinan yang mendefinisikan ruang gerak PPL sebelum program apapun bisa berfungsi (Moustakas, 1994; Creswell & Poth, 2018).

Temuan ini beresonansi dengan konsep structural constraint dalam teori tindakan sosial Giddens (1984): agen (PPL) beroperasi dalam struktur yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan. Rizqullah, et al. (2021) mengkonfirmasi dalam konteks Indonesia bahwa peran PPL terhadap kinerja kelompok tani sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah — sebuah temuan yang memberikan dukungan empiris tambahan terhadap argumen tentang asimetri infrastruktur di Sebatik. Namun berbeda dari Giddens yang menekankan dualitas struktur-agen, data menunjukkan bahwa PPL mengembangkan kesadaran akan batas struktur itu sendiri — dan justru dari kesadaran itulah strategi adaptif lahir. Ini adalah nuansa yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh teori strukturasi konvensional.

Tegangan Vertikal: Menjadi Buffer Antara Dua Dunia



Gambar 1. Pendampingan bersama Kelompok Tani Karya Bersama Desa Setabu, Sebatik Barat dan Kapolsek Sebatik Barat terkait penanaman jagung pakan

Jika tegangan horizontal adalah antara PPL dan pasar Malaysia, maka ada satu lagi tegangan yang lebih tersembunyi namun tidak kurang beratnya: tegangan vertikal antara PPL dan sistem birokrasi yang berada di atasnya. Ini adalah tegangan yang terjadi bukan di ladang atau di tepi selat, melainkan di meja kerja, di laporan, di angka target yang harus dipenuhi.

"Yang menjadi tantangan adalah pelaporan data: di kabupaten kita masih bisa memberi alasan kondisi lapangan, tapi di pusat mereka tidak mau tahu soal kemarau atau minimnya air. Target laporan tetap harus sesuai permintaan mereka."

Ada ironi yang mencolok dalam pernyataan ini, dan PPL-SB-01 tampaknya menyadarinya sepenuhnya. Ia adalah orang yang paling mengetahui kondisi lapangan — yang menyaksikan sendiri kemarau, banjir, harga yang tiba-tiba anjlok, atau petani yang beralih ke sawit — namun suaranya paling kecil dalam sistem yang harusnya merespons informasi tersebut. Di level kabupaten, masih ada ruang untuk negosiasi; di level pusat, tidak. Informasi tentang realitas lapangan 'habis' dalam perjalanannya ke atas, dan yang sampai hanyalah angka yang diisi berdasarkan tuntutan, bukan berdasarkan kenyataan.

Pengalaman ini memiliki konsekuensi yang lebih dalam dari sekadar tekanan administratif. PPL menjadi *buffer* — penyerap tegangan antara dua sistem yang tidak saling memahami: sistem pemerintah pusat yang berorientasi pada target dan dokumentasi, dan sistem sosial-ekologis perbatasan yang beroperasi dengan logika yang sama sekali berbeda. Lipsky (2010) dalam konsep *street-level bureaucracy* menggambarkan fenomena serupa:

petugas garis depan secara struktural selalu berada di titik tekanan antara kebijakan dari atas dan realitas dari bawah. Namun di Sebatik, tegangan ini diperparah oleh dimensi lintas batas yang tidak ada dalam konteks studi Lipsky — yaitu kehadiran sistem ekonomi negara lain sebagai variabel yang aktif membentuk realitas lapangan.

Data mengungkap paradoks yang menarik: PPL yang 'tidak mengikuti protokol' karena beradaptasi dengan kondisi lapangan justru adalah PPL yang paling efektif dalam menjalankan mandat penyuluhan yang sesungguhnya. Sementara yang memaksakan protokol tanpa adaptasi mungkin menghasilkan laporan yang lebih baik, tapi hasil penyuluhan yang lebih buruk. Ini adalah dilema klasik agen birokrasi garis depan yang belum banyak dikaji dalam konteks penyuluhan pertanian perbatasan Indonesia.

Negosiasi Parsial Sebagai Etika Kerja Lapangan



Gambar 2. Pendampingan tanam padi terkait swasembada pangan bersama Kelompok Tani Bina Maisyah Desa Liang Bunyu, Sebatik Barat

Strategi ini tidak tertulis dalam program penyuluhan manapun. Tidak ada modul pelatihan PPL yang mengajarkan 'cara menegosiasikan orientasi pasar petani secara inkremental dalam konteks keterbatasan infrastruktur lintas batas'. Yang ada hanyalah pengalaman bertahun-tahun di lapangan, kesadaran akan apa yang bisa dan tidak bisa diubah, dan kepraktisan yang lahir dari empati terhadap rasionalitas petani.

"Pendekatannya ya dengan mengajak petani bicara — menjelaskan manfaat menjual ke dalam negeri. Tapi untuk 100 persen mengalihkan ke Indonesia, itu tidak bisa. Kami bisa mendorong sebagian dialihkan ke Indonesia. Begitu ada jadwal panen, PPL langsung koordinasi dengan Bulog untuk datang ambil hasil panen."

Perhatikan bagaimana PPL-SB-01 mendeskripsikan perannya: bukan memaksa petani, bukan mengubah pasar Malaysia, bukan menunggu kebijakan berubah dari atas — melainkan bergerak di celah-celah yang tersedia. Ketika Bulog masuk, PPL langsung memposisikan diri sebagai jembatan antara jadwal panen petani dan jadwal pengambilan

Bulog. Ketika kapal *ferry* (layanan transportasi antarpulau) mulai beroperasi, PPL memanfaatkannya untuk membantu distribusi pisang ke Nunukan. Bukan revolusi — tetapi akumulasi tindakan kecil yang, dilihat dalam jangka panjang, membentuk pergeseran yang nyata.

PPL-GRP menambahkan dimensi yang penting: prasyarat bagi semua ini adalah kepastian harga dan kepastian pembeli. Tanpa dua hal itu, tidak ada strategi penyuluhan yang bisa mengubah perilaku pasar petani perbatasan. Ini bukan naivitas — ini adalah pemahaman yang sangat sofistikasi tentang bagaimana pasar bekerja di kawasan kepulauan terpencil.

"Intinya: ada yang beli, ada tempat jual, harganya tetap — itulah yang dibutuhkan petani Sebatik."

Dalam kalimat sederhana ini tersimpan sebuah teori: kemandirian pangan tidak dimulai dari penyuluhan tentang varietas unggul atau teknik tanam — ia dimulai dari kepastian bahwa ada pasar yang bisa dipercaya. PPL yang memahami hal ini — dan data menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitian ini memahaminya dengan dalam — akan bekerja secara berbeda dari PPL yang hanya mengikuti program tanpa kontekstualisasi. Pemahaman ini sejalan dengan temuan Mularahman, et al. (2023) yang menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan berbasis kepercayaan pasar adalah kunci keberlanjutan agribisnis di kawasan terpencil.

Soraya, et al. (2021) menemukan bahwa peran penyuluh terhadap sikap petani bersifat gradual dan sangat bergantung pada kedekatan relasional — temuan yang sejalan dengan cara PPL Sebatik membangun pengaruh secara inkremental. Strategi negosiasi parsial yang dikembangkan PPL merupakan manifestasi dari apa yang Lipsky (2010) sebut sebagai *discretionary practice* — diskresi informal yang dikembangkan agen garis depan sebagai respons terhadap kondisi yang tidak tercakup oleh protokol formal. Namun berbeda dari kritik Lipsky yang menganggap diskresi bisa menjadi sumber ketidakadilan, dalam konteks Sebatik diskresi ini justru berfungsi sebagai mekanisme keadilan: ia memungkinkan PPL untuk merespons realitas petani dengan cara yang program formal tidak mampu lakukan. Setiawan & Susanto (2024) menemukan hal serupa dalam kajian mereka tentang mediasi PPL — bahwa efektivitas penyuluhan sangat ditentukan oleh kemampuan PPL mengembangkan pendekatan yang melampaui manual.

Relasi dan Kekeluargaan Sebagai Tumpuan Makna Modal Sosial yang Tak Bisa Diwariskan

Di antara semua hal yang membuat PPL di Sebatik efektif — atau sebaliknya, tidak efektif — tidak ada yang lebih determinan dari lamanya mereka mengenal petani yang mereka dampingi. Ini bukan temuan yang mengejutkan, tapi implikasinya sering kali luput dari perhatian pengambil kebijakan: modal sosial relasional tidak bisa diakumulasikan dengan cepat, tidak bisa dipindahtangankan, dan tidak bisa digantikan oleh dokumen atau pelatihan apapun.

"Di Sebatik Barat, petaninya bagus. Tapi yang paling membekas adalah di Desa Binalawan. Tantangannya terutama dalam pendekatan ke petani laki-laki yang karakternya cukup keras. Ketika ada kebijakan dari Dinas yang disampaikan, reaksinya beragam — ada yang langsung menerima, ada yang tidak."



Gambar 3. Kegiatan panen jagung pakan terkait swasembada pangan bersama Kelompok Tani Bina Mandiri Desa Binalawan dan Kapolsek Sebatik Barat

Pernyataan ini mengandung lebih dari sekadar deskripsi tentang karakter petani. Ia mencerminkan pengalaman PPL dalam berhadapan dengan komunitas yang tidak secara otomatis mempercayai institusi — dan yang, dalam konteks perbatasan, memiliki alternatif nyata selain bergantung pada program pemerintah. Petani Binalawan yang 'karakternya keras' bukan tidak rasional; mereka adalah individu yang sudah tahu bahwa janji program sering kali tidak terwujud, dan yang memiliki pengalaman langsung dengan pasar Malaysia yang lebih konsisten. Mendekati petani seperti ini membutuhkan modal sosial yang hanya bisa dibangun melalui waktu dan konsistensi kehadiran — bukan melalui pelatihan komunikasi.

PPL-GRP menambahkan data yang penting: PPL yang paling senior — yang sudah bertugas lebih dari lima tahun di lokasi yang sama — adalah yang memiliki kedekatan paling dalam dengan petani binaannya. Kedekatan ini adalah prasyarat bagi pengaruh, dan pengaruh adalah prasyarat bagi perubahan perilaku. Putnam (2000) dalam teorinya tentang modal sosial membedakan antara *bridging social capital* (yang menghubungkan kelompok berbeda) dan *bonding social capital* (yang memperkuat ikatan dalam kelompok). Apa yang dibangun PPL senior di Sebatik adalah bentuk modal sosial yang melampaui keduanya: ia bersifat personal, bertingkat, dan dibentuk oleh pengalaman bersama menavigasi kesulitan. Warnaen (2021) dalam kajiannya tentang penyuluhan berbasis modal sosial pada masyarakat Tengger menemukan bahwa kepercayaan komunal yang tertanam dalam tradisi lokal menjadi fondasi efektivitas penyuluhan yang tidak bisa digantikan oleh pendekatan teknis apapun — sebuah temuan yang mendapat konfirmasi kuat dari data Sebatik.

Keluargaan sebagai Jangkar Eksistensial



Gambar 4. Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan PKB di Kelompok Tani Sebatik Barat

Mungkin temuan yang paling menyentuh dari seluruh penelitian ini adalah konsistensi dengan mana seluruh partisipan — dari Kepala BPP hingga PPL lapangan — menyebut keluargaan dan gotong royong sebagai alasan utama mereka bertahan di Sebatik. Ini menarik perhatian justru karena sifatnya yang seragam dan spontan: tidak ada satupun partisipan yang diminta untuk menyebut faktor motivasi — mereka menyebutnya sendiri, dalam kata-kata yang berbeda tetapi dengan makna yang sama.

"Nuansa keluargaan yang masih sangat kuat — baik antara petani maupun antara PPL dan petani. Semangat gotong royong masih terjaga, berbeda dengan di kota yang sudah

lebih individualistik. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya dan rekan-rekan untuk bertahan di sini. Sukanya itu karena masyarakatnya. Rasa kekeluargaan di sini jauh lebih kuat dibanding di kota — lebih hangat dan guyub."

Ada sesuatu yang paradoksal dan sekaligus indah dalam temuan ini: hambatan geografis yang secara teknis mempersulit pekerjaan PPL — harus menyeberang laut, jauh dari kota, jauh dari keluarga asal — justru menjadi kondisi yang menciptakan ikatan sosial lebih erat. Isolasi yang seharusnya menjadi beban malah menjadi fondasi komunitas. PPL menyebut 'kota yang lebih individualistik' sebagai kontras yang membuat mereka menghargai apa yang ada di Sebatik — dan dalam penghargaan itulah mereka menemukan makna untuk tetap bertugas.

Pramana & Rafinda (2022) membuktikan bahwa kompetensi dan motivasi secara bersama-sama menentukan kinerja PPL — namun penelitian tersebut belum mempertimbangkan dimensi makna eksistensial yang lahir dari keterlibatan mendalam PPL dengan komunitasnya. Dalam perspektif fenomenologi eksistensial, pengalaman ini dapat dipahami sebagai apa yang Heidegger sebut sebagai *Heimlichkeit* — perasaan 'di rumah' atau *dwelling* yang muncul dari keterlibatan mendalam dengan tempat dan komunitas (Heidegger, 2010). PPL di Sebatik tidak sekadar bekerja di suatu tempat; mereka telah, dalam arti yang dalam, menjadi bagian dari tempat itu. Dan justru karena itulah mereka tidak bisa begitu saja dipindahkan atau digantikan tanpa kehilangan sesuatu yang tidak bisa diukur dalam laporan kinerja apapun. Temuan ini beresonansi dengan kajian Mardikanto & Soebiato (2017) tentang dimensi pengabdian dalam penyuluhan pertanian Indonesia sebagai motivasi intrinsik yang melampaui insentif formal — namun data Sebatik memberikan kedalaman fenomenologis yang tidak tertangkap dalam kajian tersebut.

Dalam proses analisis, peneliti menyadari satu hal yang perlu didokumentasikan sebagai bagian dari reflektivitas: ada kecenderungan awal untuk menginterpretasikan 'kekeluargaan' sebagai strategi *coping* — sebuah mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan PPL untuk merasionalisasi kondisi kerja yang sulit. Setelah member checking dan pembacaan ulang yang lebih cermat, interpretasi ini direvisi. Yang muncul dari data bukan rasionalisasi — ia adalah pengalaman otentik yang berdiri sendiri. Peneliti dari luar komunitas Sebatik perlu berhati-hati untuk tidak mereduksi pengalaman ini menjadi sesuatu yang lebih 'dapat dijelaskan' oleh kerangka teori yang sudah ada.

Hambatan Berlapis, Transformasi, dan Posisi Penjaga Kemungkinan Sistem yang Tidak Dirancang untuk Mereka



Gambar 5. Pendampingan kegiatan uji kompetensi SMKN Sebatik Barat

PPL di Sebatik menghadapi frustrasi yang unik: bukan frustrasi karena tidak ada yang peduli, melainkan frustrasi karena ada yang peduli — tapi cara kepedulian itu diwujudkan tidak cocok dengan realitas yang mereka hadapi. Bantuan sarana dan prasarana dari pusat itu ada. Subsidi ada. Program pengembangan kelompok tani ada. Yang tidak ada adalah adaptasi sistem tersebut terhadap konteks kepulauan perbatasan.

"Sampai sekarang belum ada satu pun petani yang berhasil melengkapi persyaratan administrasi sapras dari pusat, sehingga bantuan itu belum bisa direalisasikan. Pupuk sawit tidak disubsidi — harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk tanaman pangan yang disubsidi."

Dua kutipan ini, dibaca berdampingan, menggambarkan kondisi yang lebih ironis dari yang terlihat di permukaan. Di satu sisi, petani membutuhkan bantuan yang tersedia secara formal — tapi persyaratan administrasinya tidak terjangkau bagi petani yang tidak punya tradisi birokrasi. Di sisi lain, komoditas yang paling banyak diusahakan petani (sawit) justru tidak mendapat subsidi pupuk, sementara subsidi diberikan untuk tanaman pangan yang tidak lagi menjadi pilihan mayoritas petani. Hasil dari dua kondisi ini adalah sebuah sistem yang secara struktural mengeksklusi penerimanya — dan PPL yang berdiri di tengah-tengahnya, mencoba menjembatani tanpa kewenangan untuk mengubah kerangkanya.

Stagnansi kelas kelompok tani — yang dalam Program 2023 tercatat 73 dari 75 kelompok masih di kelas Pemula — bukan cerminan kemalasan atau ketidakmampuan petani. Mubarakah, et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi PPL sebagai fasilitator, dinamisor, dan motivator adalah determinan utama peningkatan kelas kelompok tani — dan kompetensi ini hanya bisa berkembang optimal dalam kondisi dukungan institusional yang memadai, yang justru absen di kawasan perbatasan kepulauan. PPL-SB-01 menjelaskan dengan tepat: petani di Sebatik Barat memilih bekerja di lapangan daripada mengurus administrasi kelompok, karena bagi mereka kerja lapangan adalah sumber penghidupan nyata sementara administrasi kelompok adalah persyaratan birokrasi yang hasilnya tidak langsung terasa. Ini adalah pilihan rasional yang dipahami PPL — meski sistem penilaian dari atas membacanya sebagai kinerja buruk. Dewi, et al. (2023) menemukan hal serupa: peran PPL sebagai fasilitator berkorelasi kuat dengan peningkatan kelas kelompok tani hanya ketika petani merasa proses administratif tersebut memberikan manfaat langsung bagi usahatani mereka — sebuah kondisi yang belum terpenuhi di Sebatik Barat.

Christyanto, et al. (2021) menemukan bahwa program pertanian perbatasan di Kalimantan sering kali gagal bukan karena program itu buruk, melainkan karena dirancang dengan asumsi kondisi daratan yang tidak berlaku di kepulauan. Penelitian ini memberikan konfirmasi empiris yang lebih dalam: mismatch antara desain sistem dan konteks implementasi bukan hanya soal logistik, tetapi soal tradisi budaya yang berbeda — tradisi administrasi birokrasi yang tidak berkembang secara organik di komunitas kepulauan yang selama ini bertahan melalui jaringan kepercayaan informal.

Transformasi yang Datang Bukan dari Tempat yang Diduga

PPL di Sebatik menghadapi frustrasi yang unik: bukan frustrasi karena tidak ada yang peduli, melainkan frustrasi karena ada yang peduli — tapi cara kepedulian itu diwujudkan tidak cocok dengan realitas yang mereka hadapi. Bantuan sarana dan prasarana dari pusat itu ada. Subsidi ada. Program pengembangan kelompok tani ada. Yang tidak ada adalah adaptasi sistem tersebut terhadap konteks kepulauan perbatasan.

"Sampai sekarang belum ada satu pun petani yang berhasil melengkapi persyaratan administrasi sapsras dari pusat, sehingga bantuan itu belum bisa direalisasikan. Petani perkebunan sawit banyak yang menjerit. Pupuk sawit tidak disubsidi — harganya jauh lebih mahal dibanding pupuk tanaman pangan yang disubsidi."



Gambar 6. Pendampingan terkait ubinan hasil panen padi di Kelompok Tani Rawah Makmur Desa Binalawan, Sebatik Barat bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan

Dua kutipan ini, dibaca berdampingan, menggambarkan kondisi yang lebih ironis dari yang terlihat di permukaan. Di satu sisi, petani membutuhkan bantuan yang tersedia secara formal — tapi persyaratan administrasinya tidak terjangkau bagi petani yang tidak punya tradisi birokrasi. Di sisi lain, komoditas yang paling banyak diusahakan petani (sawit) justru tidak mendapat subsidi pupuk, sementara subsidi diberikan untuk tanaman pangan yang tidak lagi menjadi pilihan mayoritas petani. Hasil dari dua kondisi ini adalah sebuah sistem yang secara struktural mengeksklusi penerimanya — dan PPL yang berdiri di tengah-tengahnya, mencoba menjembatani tanpa kewenangan untuk mengubah kerangkanya.

Stagnansi kelas kelompok tani — yang dalam Program 2023 tercatat 73 dari 75 kelompok masih di kelas Pemula — bukan cerminan kemalasan atau ketidakmampuan petani. Mubarakah, et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi PPL sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator adalah determinan utama peningkatan kelas kelompok tani — dan kompetensi ini hanya bisa berkembang optimal dalam kondisi dukungan institusional yang memadai, yang justru absen di kawasan perbatasan kepulauan. PPL-SB-01 menjelaskan dengan tepat: petani di Sebatik Barat memilih bekerja di lapangan daripada mengurus administrasi kelompok, karena bagi mereka kerja lapangan adalah sumber penghidupan nyata sementara administrasi kelompok adalah persyaratan birokrasi yang hasilnya tidak langsung terasa. Ini adalah pilihan rasional yang dipahami PPL — meski sistem penilaian dari atas membacanya sebagai kinerja buruk. Dewi, et al. (2023)

menemukan hal serupa: peran PPL sebagai fasilitator berkorelasi kuat dengan peningkatan kelas kelompok tani hanya ketika petani merasa proses administratif tersebut memberikan manfaat langsung bagi usahatani mereka — sebuah kondisi yang belum terpenuhi di Sebatik Barat.

Christyanto, et al. (2021) menemukan bahwa program pertanian perbatasan di Kalimantan sering kali gagal bukan karena program itu buruk, melainkan karena dirancang dengan asumsi kondisi daratan yang tidak berlaku di kepulauan. Penelitian ini memberikan konfirmasi empiris yang lebih dalam: mismatch antara desain sistem dan konteks implementasi bukan hanya soal logistik, tetapi soal tradisi budaya yang berbeda — tradisi administrasi birokrasi yang tidak berkembang secara organis di komunitas kepulauan yang selama ini bertahan melalui jaringan kepercayaan informal.

Penjaga Kemungkinan: Merefleksikan Esensi Pengalaman

Temuan yang paling tidak terduga — dan yang paling signifikan secara akademis — adalah bahwa kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung (2024–2025) sudah jauh berbeda dari gambaran Programa 2023 yang menjadi basis ekspektasi penelitian ini. Alat pengolahan pisang yang dalam Programa tercatat 'belum difungsikan' kini sudah beroperasi dikelola oleh UMKM dan Kelompok Wanita Tani — yang kini mengelola alat pengolahan pisang, sebuah transformasi yang konsisten dengan temuan Hapsari, et al. (2023) bahwa komunikasi penyuluhan yang efektif meningkatkan kompetensi anggota kelompok wanita tani secara signifikan. Bulog sudah masuk dan membayar petani langsung. Pabrik sawit di Bambang sudah beroperasi. Jalur PRI membantu distribusi pisang ke Nunukan.

"Kondisi 2023 itu memang benar terjadi — saat itu terkendala SDM dan ketersediaan listrik. Namun sekarang alat tersebut sudah dikelola oleh UMKM, termasuk kelompok wanita tani, sehingga sudah berfungsi. Kesejahteraan petani beberapa tahun terakhir sudah jauh membaik setelah pemerintah melibatkan Bulog."

Yang perlu diperhatikan adalah cara PPL dan Kepala BPP merespons perubahan ini. Tidak ada klaim bahwa 'ini berhasil karena program kami'. Sebaliknya, ada kerendahan hati yang tampak dalam cara mereka bercerita: kondisi membaik karena konvergensi banyak faktor — kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, perubahan regulasi. PPL adalah bagian dari ekosistem itu, bukan pusat gravitasinya. Posisi ini bukan kelemahan — ia adalah pemahaman yang dewasa tentang perubahan sosial: perubahan yang

berkelanjutan tidak terjadi karena satu aktor, melainkan karena banyak kondisi yang bertemu pada waktu yang tepat.

Namun ada satu hal yang perlu diakui: fondasi kepercayaan yang dibangun PPL selama bertahun-tahun adalah kondisi yang memungkinkan petani merespons perubahan-perubahan itu secara positif. Ketika Bulog datang, petani mau berkoordinasi — karena ada PPL yang sudah lebih dulu membangun kepercayaan bahwa pasar domestik bisa dipercaya. Ketika *ferry* beroperasi, petani mau mencoba jalur distribusi baru — karena ada PPL yang terus-menerus menjelaskan manfaatnya. Perubahan struktural membutuhkan perubahan budaya, dan perubahan budaya membutuhkan manusia yang konsisten hadir di tengah komunitas. Itulah peran PPL yang sesungguhnya dalam transformasi ini.

Penjaga Kemungkinan: Merefleksikan Esensi Pengalaman

Sintesis dari keempat tema membawa penelitian ini pada satu pernyataan esensi yang melampaui deskripsi teknis tentang tugas PPL: menjadi PPL di kawasan perbatasan BPP Sebatik Barat adalah pengalaman hidup dalam tegangan yang tidak bisa diselesaikan — hanya bisa dinavigasi. Dan navigasi itu dilakukan bukan dengan teknik atau protokol, melainkan dengan kesabaran yang bermakna dan relasi yang dirawat.

Konstruksi teoritis yang diusulkan penelitian ini — 'penjaga kemungkinan' (*keeper of possibilities*) — menangkap esensi ini dengan lebih tepat daripada framing konvensional PPL sebagai 'agen perubahan' (*agent of change*). *Framing* agen perubahan mengimplikasikan bahwa PPL adalah motor utama transformasi, yang tidak sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Sumardjo, et al. (2020) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi PPL yang berkelanjutan harus menjadi prioritas kebijakan — terutama di wilayah 3T di mana tantangan lapangan paling kompleks namun dukungan pengembangan SDM justru paling minim. *Framing* penjaga kemungkinan mengakui bahwa PPL bukanlah penyebab tunggal perubahan, namun adalah pihak yang memastikan bahwa kondisi untuk perubahan tetap terjaga: kepercayaan tidak putus, pengetahuan terus mengalir, dan petani tidak sepenuhnya teralienasi dari sistem nasional meski gravitasi pasar Malaysia terus bekerja.

Framing ini memiliki implikasi yang signifikan untuk bagaimana kita mengevaluasi kinerja penyuluhan pertanian di kawasan perbatasan. Jika kita menggunakan metrik 'agen perubahan' — jumlah inovasi yang diadopsi, kelas kelompok tani yang naik, komoditas yang berhasil dialihkan ke pasar domestik — maka PPL Sebatik akan selalu terlihat gagal. Tetapi jika kita menggunakan metrik 'penjaga kemungkinan' — apakah

kepercayaan petani terhadap institusi penyuluhan terjaga, apakah jaringan sosial yang memungkinkan intervensi masih ada, apakah petani masih mau berkoordinasi ketika ada perubahan kebijakan yang menguntungkan mereka — maka gambaran yang muncul sangat berbeda.

Penelitian ini mengusulkan pergeseran framing dari 'PPL sebagai agen perubahan' (*agent of change*) ke 'PPL sebagai penjaga kemungkinan' (*keeper of possibilities*) dalam konteks kawasan perbatasan 3T. Pergeseran ini bukan sekadar pergantian metafora; ia mengimplikasikan perubahan dalam cara kita merancang program pelatihan, sistem evaluasi kinerja, dan kebijakan pengembangan SDM penyuluhan di wilayah-wilayah yang kondisi strukturalnya tidak memungkinkan perubahan cepat. Kontribusi ini memperkaya dan sebagian mengoreksi literatur penyuluhan yang selama ini mendominasi dengan paradigma difusi inovasi Rogers (2003) yang terlalu berfokus pada kecepatan adopsi sebagai indikator efektivitas.

Tema dalam penelitian ini membentuk sebuah gambar yang lebih kompleks dan lebih jujur tentang pengalaman PPL di kawasan perbatasan daripada yang selama ini tersedia dalam literatur penyuluhan pertanian Indonesia. Hal ini bukan tentang PPL yang gagal karena tidak berhasil mengubah orientasi pasar petani — kegagalan itu tidak mungkin, karena ia melawan struktur. Ini juga bukan tentang PPL yang heroik yang berhasil mempertahankan kemandirian pangan nasional di garis terdepan — klaim itu terlalu besar untuk satu kelompok dengan 10 orang.

Gambaran yang muncul adalah sepuluh orang PPL yang bekerja di dua kecamatan di pulau yang berbagi daratan dengan Malaysia, yang setiap hari menghadapi gravitasi pasar yang menarik petani ke arah berlawanan, yang setiap bulan mengisi laporan untuk sistem yang tidak mengenali nuansa kondisi mereka, yang membangun kepercayaan satu petani dalam satu waktu, dan yang menemukan makna bukan dalam statistik keberhasilan program melainkan dalam kehangatan komunitas yang telah menjadi rumah mereka. Dan yang — ketika perubahan akhirnya terjadi, perlahan dan dari berbagai arah — merasakannya bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai konfirmasi bahwa kesabaran mereka adalah sebuah bentuk kerja yang nyata.

Penelitian ini berposisi dalam dialog kritis dengan Prestiana, et al. (2023) dan Sitorus (2024) yang menekankan peran PPL sebagai agen adopsi inovasi yang aktif. Data dari Sebatik tidak menyangkal peran itu — tetapi menunjukkan bahwa efektivitas peran tersebut sangat dikondisikan oleh konteks struktural yang sering kali diabaikan dalam

penelitian-penelitian tersebut: keterbatasan infrastruktur, asimetri pasar lintas batas, dan mismatch antara sistem kebijakan dan tradisi budaya lokal. Di kawasan perbatasan kepulauan, mengukur efektivitas PPL hanya dari tingkat adopsi inovasi adalah seperti mengukur kemampuan renang seseorang di kolam yang tidak berair.

Sugihono, et al. (2024) melaporkan digitalisasi penyuluhan yang masif di Indonesia — 95% PPL menggunakan *WhatsApp*. Data Sebatik memberikan nuansa kritis: digitalisasi tidak bisa menjadi solusi universal ketika satu dari delapan desa dalam wilayah kerja BPP belum memiliki sinyal selular sama sekali. Nuryadi, et al. (2023) menemukan bahwa literasi informasi memoderasi pengaruh informasi digital terhadap kinerja PPL — artinya infrastruktur digital saja tidak cukup tanpa kapasitas literasi yang mendukung, sebuah kondisi yang semakin jauh dari jangkauan di wilayah 3T kepulauan. Transformasi digital penyuluhan yang tidak mempertimbangkan digital divide kepulauan adalah transformasi yang meninggalkan yang paling membutuhkan.

Akhirnya, penelitian ini adalah undangan untuk mendengarkan suara yang selama ini tidak cukup didengar dalam diskursus kebijakan penyuluhan pertanian Indonesia: suara PPL yang bertugas di wilayah 3T dan perbatasan. Mereka bukan kelompok yang membutuhkan belas kasihan — mereka adalah profesional yang membutuhkan sistem yang dirancang untuk konteks mereka, bukan sistem yang dirancang untuk konteks lain dan dipaksakan kepada mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana namun menyimpan kedalaman yang tidak mudah dijangkau oleh pendekatan konvensional: bagaimana rasanya menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan di Pulau Sebatik — pulau yang berbagi daratan dengan Malaysia, di mana petani yang setiap hari didampingi justru memiliki jaringan ekonomi yang lebih kuat ke Tawau daripada ke Nunukan? Melalui analisis fenomenologis tujuh langkah Moustakas (1994) terhadap transkripsi wawancara mendalam, penelitian ini menemukan pola makna yang membentuk esensi pengalaman PPL di kawasan perbatasan BPP Sebatik Barat: pertama, tegangan ganda yang bersifat struktural — tegangan horizontal antara program penyuluhan nasional dan gravitasi pasar Malaysia yang tidak bisa dilawan sepenuhnya, serta tegangan vertikal antara realitas lapangan yang kompleks dan sistem pelaporan birokrasi yang tidak sensitif konteks; kedua, negosiasi parsial sebagai etika kerja lapangan — strategi inkremental yang dikembangkan dari pengalaman, bukan dari manual, yang mendorong perubahan di celah-celah yang

tersedia tanpa mengklaim lebih dari apa yang mungkin; ketiga, relasi dan kekeluargaan sebagai tumpuan makna — modal sosial yang dibangun bertahun-tahun dengan petani adalah sumber daya yang lebih menentukan daripada program apapun, dan rasa kekeluargaan dengan komunitas Sebatik adalah jangkar eksistensial yang membuat PPL bertahan bukan karena insentif material, melainkan karena pengalaman afektif yang tidak ditemukan di tempat lain; dan keempat, posisi penjaga kemungkinan di tengah hambatan berlapis dan transformasi yang sedang berlangsung — suatu kondisi di mana PPL bukan motor utama perubahan, melainkan pihak yang memastikan fondasi kepercayaan tetap terjaga sehingga perubahan struktural dari luar — masuknya Bulog, beroperasinya pabrik sawit, dan tersedianya jalur *ferry*. Dari keempat pola makna ini, penelitian ini mengusulkan pergeseran framing konseptual yang memiliki implikasi mendasar: PPL di kawasan perbatasan 3T tidak seharusnya dievaluasi dengan metrik 'agen perubahan' (*agent of change*) yang mengasumsikan bahwa efektivitas penyuluhan setara dengan kecepatan adopsi inovasi atau naiknya kelas kelompok tani — metrik yang lahir dari paradigma difusi inovasi Rogers (2003) dan yang secara struktural tidak adil ketika diterapkan di konteks yang kondisi prasyaratnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, framing 'penjaga kemungkinan' (*keeper of possibilities*) lebih akurat secara empiris dan lebih adil secara epistemologis: ia mengakui bahwa keberlanjutan kepercayaan, konsistensi kehadiran, dan pemeliharaan jaringan sosial di komunitas perbatasan adalah bentuk kerja yang nyata, terukur secara kualitatif, dan berkontribusi pada ketahanan pangan dalam jangka panjang meskipun hasilnya tidak selalu muncul dalam laporan triwulanan manapun. Secara praktis, temuan ini membawa tiga implikasi kebijakan yang mendesak: pertama, sistem manajemen kinerja PPL di wilayah 3T dan perbatasan perlu didesain ulang dengan indikator yang mencerminkan karakteristik konteks — bukan indikator seragam nasional yang tidak mempertimbangkan asimetri infrastruktur, keterbatasan aksesibilitas, dan tradisi budaya lokal yang berbeda; kedua, kebijakan penempatan PPL perlu mempertimbangkan stabilitas jangka panjang sebagai nilai, mengingat modal sosial relasional yang menjadi efektivitas PPL hanya bisa dibangun melalui akumulasi waktu yang tidak bisa dipersingkat — rotasi yang terlalu cepat akan menghancurkan aset yang paling tidak terlihat namun paling menentukan; dan ketiga, sistem sapsras dan subsidi pertanian perlu diadaptasi secara substantif untuk konteks kepulauan perbatasan, di mana persyaratan administratif yang dirancang untuk petani di Jawa dengan tradisi birokrasi yang berkembang akan secara sistematis mengeksklusi petani di Sebatik yang selama ini bertahan melalui jaringan

kepercayaan informal. Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang perlu diakui secara jujur: seluruh data bersumber dari satu BPP di dua kecamatan, dengan partisipan yang secara relatif homogen dalam hal status kepegawaian (PNS) dan orientasi kelembagaan; perspektif PPL yang telah resign, dimutasi, atau yang gagal beradaptasi tidak terwakili, sehingga gambar yang terbentuk mungkin lebih positif dari pengalaman keseluruhan; dan depth wawancara, meski cukup untuk analisis tematik, belum sepenuhnya mengeksplorasi dimensi pengalaman yang paling pribadi dan paling rentan — pengikisan makna eksistensial yang mungkin membutuhkan pendekatan naratif yang lebih mendalam dan jangka panjang untuk benar-benar terungkap. Ruang-ruang yang belum ter gali ini membuka agenda riset yang kaya untuk penelitian lanjutan: studi komparatif fenomenologis di seluruh kecamatan Pulau Sebatik akan memungkinkan pemetaan variasi pengalaman yang lebih kaya; penelitian naratif berbasis *life history* dengan PPL senior yang telah bertugas lebih dari satu dekade akan mengungkap dimensi biographical dari pembentukan identitas penyuluh perbatasan; studi etnografis jangka panjang yang mengikuti PPL dalam rutinitas kerja sehari-hari akan menangkap 'strategi senyap' yang masih sebagian besar tidak terlihat dalam wawancara; dan penelitian kuantitatif konfirmatori yang mengoperasionalkan konstruk 'penjaga kemungkinan' sebagai instrumen pengukuran akan memberikan validasi yang lebih luas dari proposisi konseptual yang dihasilkan penelitian ini. Pada akhirnya, penelitian ini adalah undangan — untuk mendengarkan, dengan lebih sungguh-sungguh, suara individu-individu yang bekerja di garis terdepan pembangunan pertanian nasional, di tempat-tempat yang jarang disebut dalam dokumen kebijakan, dengan cara-cara yang jarang tercatat dalam laporan kinerja, dan dengan makna yang tidak pernah bisa sepenuhnya ditangkap oleh angka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Koordinator BPP Sebatik Barat beserta seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petani di Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, atas kesediaan, keterbukaan, dan kepercayaan yang diberikan selama proses pengumpulan data berlangsung. Tanpa kesaksian jujur mereka, penelitian ini tidak akan memiliki substansi yang berarti. Terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan atas dukungan akses institusional dan ketersediaan dokumen Programa BPP Sebatik Barat Tahun 2023 sebagai sumber data sekunder yang sangat berharga. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Program Studi Magister

Manajemen dan Program Studi Magister Agroteknologi UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan dukungan akademik dan lingkungan intelektual yang memungkinkan penelitian lintas disiplin ini terwujud. Peneliti juga berterima kasih kepada para kolega dan reviewer yang memberikan masukan konstruktif dalam proses penyempurnaan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). Peranan penyuluh pertanian dalam mendukung keberlanjutan agribisnis petani muda di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(1), 17–32. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i1.7984>
- BPP Sebatik Barat. (2023). Program penyuluhan pertanian BPP Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tahun 2023. Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Christyanto, Y., Hadi, A. R., & Winarsih, S. (2021). Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 1–12.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. W. K., Prasetyo, H., & Fibriningtyas, A. (2023). Peran penyuluh terhadap peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (kasus di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2), 493–504. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.13>
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Hapsari, H., Rahmah, A. N., Munziah, E., & Suminartika, E. (2023). Analisis proses komunikasi penyuluhan pertanian dalam peningkatan kompetensi petani: Studi kasus Kelompok Wanita Tani Lestari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10(1), 1–12.
- Heidegger, M. (2010). *Being and time* (J. Stambaugh, Trans.; Rev. ed.). State University of New York Press. (Original work published 1927).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (2nd ed.). Russell Sage Foundation.

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (4th ed.). Alfabeta.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.
- Mubarokah, M. N., Gulto, M., & Siregar, A. (2024). Kompetensi penyuluh pertanian lapangan dalam peningkatan kelas kelompok tani. *Jurnal Penyuluhan*, 20(2), 349–359. <https://doi.org/10.25015/20242448959>
- Mularahman, M., Nurhaedah, N., & Wahyuningsih, T. (2023). Peran penyuluh pertanian dalam keberlanjutan agribisnis pemuda tani di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Agrica Ekstensia*, 17(1), 38–49.
- Noe, R. A. (2017). *Employee training and development* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Nurida, N., Evahelda, E., & Sitorus, R. (2024). Peran penyuluh pertanian dalam pendampingan petani milenial. *Jurnal Penyuluhan*, 20(1), 84–95. <https://doi.org/10.25015/20202444448>
- Nuryadi, B. A., Saleh, K., & Salampesi, Y. L. (2023). Pengaruh informasi digital terhadap kinerja penyuluh pertanian dengan literasi informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 28–40. <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i3.483>
- Nuzuliyah, L., & Irawan, D. (2022). Evaluasi penyuluhan model sekolah lapang terhadap perubahan perilaku petani padi di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *Partner*, 27(2), 1836–1847. <https://doi.org/10.35726/jp.v27i2.800>
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. (2016). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pramana, D., & Rafinda, M. S. (2022). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja penyuluh pertanian. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 7(2), 112–123.
- Prestiana, S. M., Padmaningrum, D., & Sugihardjo, S. (2023). Peran penyuluh pertanian sebagai agent of change dalam adopsi inovasi padi Rojolele Srinuk di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 8(3), 176–185.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rizqullah, T. A. M., Susanti, E., & Makmur, T. (2021). Peran penyuluh pertanian lapangan terhadap kinerja kelompok tani di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(4), 358–373.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press. (Original work published 1962).
- Setiawan, B., & Susanto, A. (2024). Peran mediasi penyuluh pertanian dalam proses difusi inovasi dan pengambilan keputusan petani. *Jurnal Penyuluhan*, 20(1), 45–58.

- Sitorus, R. H. (2024). Efektivitas pendampingan penyuluh pertanian terhadap adopsi inovasi pertanian berkelanjutan. *Jurnal Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian*, 11(2), 89–104.
- Soraya, Y. G., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2021). Peran penyuluh terhadap sikap petani dalam penerapan benih padi Inpari 32. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 324–333.
- Sugihono, T., Hariadi, S. S., & Wastutiningsih, S. P. (2024). Transformasi digital penyuluhan pertanian: Penggunaan smartphone dan WhatsApp dalam penyuluhan pertanian di era Society 5.0. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(5), 1150–1161.
- Sumardjo, S., Lubis, D. P., & Mulyandari, R. S. H. (2020). Strategi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 39(2), 87–96. <https://doi.org/10.21082/jp3.v39n2.2020.p87-96>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (2006). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wardani, W., & Anwarudin, O. (2018). Peran penyuluh terhadap penguatan kelompok tani dan regenerasi petani di Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(1), 191–202. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i1.113>
- Warnaen, A. (2021). Sistem penyuluhan pertanian: Suatu pendekatan penyuluhan pertanian berbasis modal sosial pada masyarakat Tengger. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(2), 82–94.